

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta telah menerapkan strategi komunikasi persuasif yang efektif dan humanis dalam menjaga ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan, dialog, dan penyadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum.

- 5.1.1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berperan sebagai komunikator yang persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis dalam menyampaikan kebijakan ketertiban kepada PKL, sehingga kredibilitas aparat tidak hanya bersumber dari otoritas formal, tetapi juga dari sikap dan cara berkomunikasi.
- 5.1.2 Pesan persuasif disampaikan dalam bentuk imbauan dan penjelasan rasional, bukan sekadar larangan, dengan tujuan membangun pemahaman PKL terhadap kebijakan penataan kawasan.
- 5.1.3 Komunikasi tatap muka langsung menjadi saluran utama dalam proses persuasi karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah dan umpan balik antara Satpol PP dan PKL.
- 5.1.4 Pedagang Kaki Lima sebagai komunikan berperan aktif dalam menerima dan menafsirkan pesan persuasif, dengan respons yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan pengalaman sebelumnya.
- 5.1.5 Efek persuasif terlihat pada perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku

PKL, yang ditunjukkan melalui meningkatnya sikap kooperatif dan kepatuhan terhadap aturan ketertiban.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam ranah komunikasi persuasif sektor publik. Temuan bahwa kredibilitas komunikator dan pendekatan humanis mampu mengubah perilaku serta persepsi masyarakat memperkuat teori Hovland, Janis, & Kelley (1953) dalam konteks birokrasi lokal Indonesia.

5.2.2 Implikasi Praktis

A. Bagi Satpol PP Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mempertahankan dan mengembangkan pola komunikasi persuasif dalam setiap kegiatan penegakan peraturan daerah. Pendekatan persuasif terbukti mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, menurunkan potensi konflik sosial, dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tanpa harus menggunakan kekuatan koersif.

B. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat menjadi model praktik komunikasi publik yang efektif di lingkungan birokrasi daerah. Pendekatan serupa dapat diterapkan pada sektor lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti dinas perdagangan, kebersihan, atau pariwisata.

C. Bagi akademisi

penelitian ini membuka ruang kajian lanjutan mengenai komunikasi persuasif aparatur publik dengan pendekatan kualitatif di berbagai konteks sosial budaya Indonesia.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Satpol PP Kota Yogyakarta

Terus meningkatkan kapasitas komunikasi interpersonal petugas melalui pelatihan dan pembinaan rutin agar kemampuan empatik dan komunikasi publik semakin baik. Satpol PP juga perlu memperkuat strategi komunikasi digital agar pesan-pesan kebijakan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

5.3.2 Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta,

Memperkuat kolaborasi lintas instansi, terutama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata, guna memastikan penataan PKL tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga berkelanjutan secara

ekonomi dan sosial. Selain itu, pemerintah perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan publik agar komunikasi dua arah lebih efektif.

5.3.3 Bagi Masyarakat dan PKL

Menjalin komunikasi yang terbuka dengan Satpol PP dan pemerintah daerah. Sikap kooperatif dan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban bersama dan mewujudkan wajah kota yang tertib, bersih, serta berdaya saing wisata.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada konteks Kota Yogyakarta. Peneliti berikutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan strategi komunikasi persuasif Satpol PP di daerah lain, atau menggunakan metode analisis wacana kritis untuk menelaah makna pesan-pesan persuasif dalam komunikasi pemerintahan.